SIKAP KITA

Siapa yang Pro-Anti Korupsi

HARI Anti Korupsi tahun ini [illegible] dengan tahun-tahun sebelumnya. Aksi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember di seluruh dunia [illegible]. [illegible] bersama. [illegible] ke jalan, mengetuk hati [illegible] bahaya korupsi.

Peringatan kali ini menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintahan SBY agar jangan main-main dengan korupsi. Tak ada asap kalau tak ada api. Begitu kata pepatah.

Aksi ini tentu bukan asal jadi. Gerakan ini berangkat dari kekecewaan rakyat yang membumbung tinggi atas sikap aparat penegak hukum pemerintahan SBY dalam kasus kriminalisasi KPK. Publik mulai curiga ada yang bermain mata. Sehingga ada skenario bersama untuk membungkam KPK dengan menyeret Bibit-Chandra ke penjara. [illegible] rakyat itu bermula.

Sekalipun kasus ini dihentikan, namun rekaman utak-atik perkara yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu sebelumnya masih terngiang di hati rakyat. Indonesia terluka. Bayangkan, seorang Anggodo bisa mengatur [illegible]. Seorang Anggodo bisa [illegible] oleh penguasa. Luka itu belum terobati, saat itu baru sebatas diperban.

Pertanyaan kita, mengapa kasus Anggodo berhenti di tengah jalan dan Anggodo bebas berkeliaran. Benarkan kita kehilangan pasal untuk menjerat Anggodo atau kehilangan sikap karena begitu menggurita pengaruh Anggodo di negeri ini.

Inilah mimpi yang tak sempurna. Mimpi negeri ini bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme yang telah dijunjung tinggi oleh rekan-rekan mahasiswa pada aksi reformasi 1998 lalu.

Berdasarkan itu, Pemerintahan SBY memang harus diingatkan. SBY adalah manusia dan aparatunya juga sama. Karena itu, tak ada yang salah dengan aksi 9 Desember yang digelar di Jakarta dan daerah-daerah di Indonesia.

Apalagi mempertanyakan sikap tegas dan komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat tinggi negara, gubernur, bupati/wali kota hingga pejabat di bawahnya.

Tidak hanya itu, sikap itu juga perlu kita pertanyakan kepada KPK, Kapolri, Jaksa Agung. Agar tidak ada jual beli perkara, agar tidak ada pesan-memesan perkara, agar tersangka tidak dijadikan ATM Bersama, agar kasus bukan untuk menakut-nakuti orang yang berperkara. Agar semua bekerja di jalurnya. Tidak perlu ada yang merasa bersih dan menuding orang lain tidak bersih, karena belum tentu kita lebih baik dari pada orang yang kita tuduh tidak baik.

Sekali lagi, tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemerintahan ini agar berjalan di rel yang benar. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil mulai dari daerah hingga pemerintah pusat. Di luar itu (gerakan yang mencoba-coba untuk menggoyang pemerintahan) tidak akan mendapat tempat di hati rakyat.

Rakyat sudah biasa merasakan dan begitu paham dengan gerakan yang menumpang di tengah jalan. Pro-anti korupsi mudah diucapkan tapi terasa pahit dirasakan. Tanyakan dalam hati, siapa yang sebenarnya pro-anti korupsi?

Terlepas dari itu semua, peringatan anti korupsi 9 Desember yang berlangsung aman menjadi bekal kita bersama. Bila tak salah, penguasa pun tak perlu takut kursinya digoyang. Mari bersuara lantang selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. (*)

Mendesain UN Berkeadilan

Oleh: Dr Lisyanto, MSi

Dosen dan staf ahli Purek Bidang Akademik Unimed serta staf Deputi Riset dan Kajian PW IKADI Sumut

"Sampai kini, tidak pernah kita membaca atau mendengar berita di media massa yang mengabarkan ada peserta dan pejabat yang dihukum atas pelanggaran UN."

UN seakan menjadi momok yang menakutkan dalam dunia pendidikan. Hasil UN yang dijadikan standar kelulusan membuat pening peserta didik, orangtua, dan guru berdegup kencang. Bukan itu saja, para pejabat mulai bupati, wali kota/bupati, kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah juga ketar-ketir dengan pencapaian standar kelulusan UN di wilayahnya. Oleh karenanya, penyelenggaraan UN yang telah berlangsung tujuh tahun itu terus menuai kritik dan menimbulkan kontroversi. Puncaknya seputar UN kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi gugatan UN yang diajukan pemerintah. Sebelumnya, pengadilan tinggi (PT) juga telah menolak gugatan pemerintah seraya mengabulkan gugatan masyarakat (citizen lawsuit) terkait UN.

Tampaknya, putusan MA bukan menjadi ganjalan pelaksanaan UN 2010, karena pemerintah masih akan mengupayakan peninjauan kembali (PK). Bahkan, pemerintah melalui Mendiknas tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan UN pada Maret 2010, dengan alasan dana 500 miliar telah dianggarkan serta UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Mendiknas menghimbau kepada masyarakat agar perdebatan perlu tidaknya pelaksanaan UN tidak diperpanjang, namun yang lebih penting adalah memberikan solusi atas penyelenggaraan UN yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu ada lima hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan UN berkeadilan dan bermartabat.

Pertama, menjadikan hasil UN untuk pemetaan mutu satuan atau program pendidikan, bukan sebagai standar kelulusan. Akar persoalan UN adalah pemberlakuan standar kelulusan secara nasional. Banyak kalangan menilai bahwa penetapan standar kelulusan UN tidak adil, karena menyamaratakan sekolah-sekolah maju di perkotaan dengan sekolah-sekolah di pinggiran atau daerah terpencil. Saat pertama kali UN digelar tahun 2002/2003, kisruh UN tidak terjadi karena standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,01 masih dapat dicapai oleh hampir seluruh siswa di pelosok negeri. Kontroversi dan gelombang unjuk rasa UN mulai terjadi akibat standar kelulusan dinaikan. Implikasi dari UN yang hasilnya dijadikan sebagai standar kelulusan adalah maraknya kecurangan yang dilakukan secara kolektif demi meraih standar kelulusan, bahkan standar kesuksesan kepemimpinan kepala daerah dan sekolah.

Kedua, Apabila hasil UN akan dijadikan sebagai standar kelulusan nasional, pemerintah harus terlebih dahulu memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) di setiap unit/satuan pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Menurut PP No. 19 tahun 2005, SNP mencakup delapan aspek yakni (1) standar isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Dengan adanya jaminan mutu atas ketercapaian delapan standar tersebut maka hasil UN dapat dijadikan sebagai standar kelulusan siswa. Logika sederhana atas gagasan tersebut adalah standarisasi sebuah produk dapat dilakukan hanya jika fasilitas dan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut juga memenuhi standar.

Ketiga, bentuk soal UN harus mampu mengukur kompetensi lulusan secara komprehensif. Selama ini, soal-soal UN lebih banyak mengukur kemampuan siswa dari aspek kognitif, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik nyaris terabaikan. Padahal UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi lulusan yang dimaksud adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Menurut SNP, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Keempat, pelaksanaan dan pengawasan yang kredibel dan akuntabel. Pada UN tahun 2009, pemerintah telah melibatkan perguruan tinggi negeri (PTN) dalam pengawasan UN. Ribuan dosen ditugaskan sebagai pengawas UN pada satuan pendidikan guna menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN. Namun upaya pemerintah tersebut masih belum efektif karena standar kelulusan UN sudah terlanjur [illegible] di hampir setiap komponen yang terlibat UN. Oleh karena itu pelaksanaan UN sebaiknya dirancang seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Peserta UN dikumpulkan pada satu tempat di kabupaten/kota masing-masing, kemudian UN dilakukan dengan pengawasan dosen dan guru. Dalam hal ini, pemerintah naskah soal UN harus dilakukan di Jakarta bukan dicetak di provinsi seperti yang terjadi saat ini, karena percetakan juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi dalam mengatur siasat kecurangan melalui pembocoran soal UN.

Kelima, reward and punishment wajib ditegakkan. Apabila mekanisme dan tahapan pelaksanaan UN telah dituangkan dalam prosedur operasi standar (POS) UN, maka pemerintah khususnya depdiknas harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan.

Artinya, pemerintah wajib menghukum siapa saja yang terbukti melakukan kecurangan dalam UN dan memberikan penghargaan kepada pihak yang berjuang penuh dedikasi dalam mewujudkan kredibilitas UN. Sampai kini, tidak pernah kita membaca atau mendengar berita di media massa yang mengabarkan ada peserta dan pejabat yang dihukum atas pelanggaran UN. Padahal UN dapat dijadikan sebagai representasi keteladanan penegakan hukum, moralitas, dan kejujuran bagi insan terpelajar di negeri ini. (*)

INTERNASIONAL

LINTAS DUNIA

Berani Jadi Gay Hukuman Mati Menanti

KAMPALA- Jangan jadi gay alias homoseksual di Uganda. Hukuman mati bakal menanti.

Tak cuma itu, undang-undang yang bakal diberlakukan juga memberi ganjaran tujuh tahun penjara bagi anggota keluarga dari orang gay tersebut yang lalai memberitahukan kepada pihak berwajib andai ada anggota keluarganya yang gay.

Kebijakan di negerinya Idi Amin itu mengundang banyak sorotan. Para aktivis mengatakan, Uganda bakal menghadapi kecaman internasional jika menerapkan peraturan seperti itu. "Pemerintah mungkin takut karena gerakan gay, khususnya di Afrika, semakin hari semakin vokal," begitu kata David Cato, seorang aktivis gay.

Selain Uganda, beberapa negara di Benua Hitam juga menolak kaum homoseksual. Nigeria, misalnya, seperti ditulis AP, Rabu (9/12), mengancam menjebloskan ke penjara hingga menghukum mati warganya yang ketahuan gay. Hal sama dilakukan oleh Pemerintah Burundi dan Rwanda. **(net/jpnn)**

Cina Kurangi Emisi Karbon Hingga 45 Persen

AFP PHOTO

Su Wei

KOPENHAGEN- Cina mendesak negara-negara maju untuk menunjukan komitmen kuat untuk mengurangi emisi gas buang. Ketua Delegasi Cina, Su Wei, mengkritik langsung langkah Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dalam KTT Iklim PBB (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark, Su menilai AS sebagai penyumbang emisi gas karbon terbesar kedua di dunia telah menetapkan komitmen yang tidak layak, sedangkan target yang diutarakan oleh Uni Eropa dianggap masih belum cukup. Su bahkan mengkritik keras langkah yang diambil oleh Jepang sebuah target yang tidak akan pernah tercapai. Demikian seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (9/12).

Pada KTT iklim yang berlangsung pada 7-18 Desember itu, Cina sendiri mengumumkan untuk mengurangi emisi gas karbonnya sebanyak 45 persen, sementara AS hanya 17 persen dari level 2005 pada tahun 2020. Uni Eropa dan Jepang akan mengurangi emisi gas karbonnya masing-masing sebanyak 20 dan 25 persen. **(net/jpnn)**

Kantor Badan Intelijen Pakistan Diserang Roket

REUTERS / STRINGER

TERLUKA: Ibu yang terluka membawa bayinya menjauh dari lokasi ledakan di Multan Pakistan, kemarin.

12 Tewas, 25 Terluka

MULTAN- Sebuah serangan bersenjata dan bom roket menghantam kantor Badan Intelijen Pakistan di pusat kota Multan, Rabu (9/12). Sedikitnya 12 orang tewas dan melukai 25 lainnya. Serbuan yang ditujukan ke kantor lembaga itu bertepatan dengan serangan gencar pasukan Pakistan terhadap basis-basis Taliban di Wazirstan, di bagian Selatan Pakistan.

Menurut kepolisian setempat, serangan itu terjadi secara simultan. Dua serangan dilakukan dengan cara bom bunuh diri. Serangan selanjutnya dengan cara menyerang langsung kantor intelijen. Mereka melontarkan granat dan peluncur roket sehingga menimbulkan ledakan hebat. Serangan roket tersebut menyebabkan gedung rusak berat. Hingga saat ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Pejabat kepolisian senior di Multan, Agha Mohd Yusuf mengatakan kepada BBC, Rabu (9/12), ada dua hingga tiga orang pelaku serangan yang mendekati ke target serangan dengan mobil. Satu di antara mereka keluar dari mobil dan tiba di pos pemeriksaan di zona militer Qasim Bela.

"Selanjutnya dia meletakkan peluncuran roket di pundaknya dan menembakkannya ke kantor. Satu gedung hancur dan kolaps," ujar Yusuf. Sehari sebelumnya, bom meledak di Lahore menyebabkan 60 orang tewas. Sepekan terakhir, serangan yang dilakukan oleh militan Islam telah menelan korban lebih dari 400 orang. **(net/jpnn)**

Uni Eropa Minta Yerusalem Dibagi Dua

BRUSSELS- Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) mendesak digelarnya negosiasi status Yerusalem. Harus diputuskan apakah wilayah itu akan menjadi ibu kota Israel atau negara Palestina di masa depan.

"Jika akan ada perdamaian sejati, sebuah jalan harus ditemukan melalui negosiasi untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota dua negara di masa depan," ujar para menteri luar negeri negara-negara Eropa, seperti dikutip *Reuters*, Rabu (9/12). Status Yerusalem merupakan kota suci tiga agama, adalah isu sensitif bagi Israel yang mempertimbangkan kota itu sebagai wilayah yang tidak dapat dibagi. Sementara rakyat Palestina ingin bagian timur Yerusalem menjadi ibu kotanya.

"Harus ada negosiasi. Jadi kami menginginkan perdamaian sejati, yang harus ditemukan melalui negosiasi untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota dua negara," papar pernyataan tersebut.

Selain status Jerusalem, pernyataan bersama menlu UE juga mengkritik pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan menyerukan agar Israel menghentikan diskriminasi terhadap warga Palestina.

Meski bulan lalu Israel menghentikan sementara pembangunan permukiman Yahudi, para menlu UE mengatakan perlu lebih banyak tindakan untuk membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan.

"Dewan (menteri) mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman, baik di Jerusalem Timur maupun Tepi Barat," sebut pernyataan itu. **(net/jpnn)**

Scanned by CamScanner